



PERAN ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI) DALAM MENANGANI KONFLIK ETNIS RAKHINE-ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2012-2013

Rr. Tiara Ayu Dewinta

Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Human conflict between the Rakhine and Rohingya ethnics in Myanmar in 2012 confiscated international society attention since it broke the human rights. This internal conflict incurred a lot of victims and increased the number of Rohingya refugees escaping to the neighbor countries indirectly engaging several countries, either IGO or NGO. One of international organizations paying attention to this conflict was Organization of Islamic Cooperation. This was an analytic descriptive research using library study method and applying the liberalism and international organization theories. The objective of this research was to find out the roles of Organization of Islamic Cooperation in ethnical conflict of Rakhine and Rohingya in Myanmar in 2012. The result of this research showed that the roles of Organization of Islamic Cooperation were including as the initiator, facilitator, and mediator. Organization of Islamic Cooperation had strived to run its roles as the IGO in helping solve the conflict between Rakhine and Rohingya ethnics in Myanmar.

Keywords: *Rohingya, Organization of Islamic Cooperation, roles, Myanmar*

1. Pendahuluan

Myanmar adalah salah satu negara yang memiliki beragam macam etnis, terdapat 135 etnis namun hanya beberapa etnis yang paling dominan dan telah menempati di berbagai wilayah sebelum Myanmar merdeka seperti Bamar, Shan, Kayin/Karen, Rakhine, Mon, Kachin, dan Kayah (www.oxfordburmaalliance.org, 2009). Etnis ini sudah diakui sebagai warga negara asli Myanmar, namun ada satu etnis yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar dan dianggap sebagai imigran gelap yaitu etnis Rohingya. (Ministry of Foreign Affairs of the Union of Myanmar, 1992).

Rohingya merupakan kaum minoritas beragama Islam yang sudah sejak lama menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti pembunuhan, pemerkosaan, penangkapan sewenang-wenang, tidak mendapatkan hak kewarganegaraan dan lain-lain, sehingga Rohingya sulit mendapatkan akses pekerjaan, pendidikan dan kesehatan (Fortify Rights, 2015). Kaum Rohingya mayoritas menempati di daerah Rakhine Myanmar, di mana daerah tersebut juga terdapat etnis yang dominan di Myanmar yaitu etnis Rakhine. Etnis ini menganut agama Buddha dan sudah sejak lama memendam kebencian dengan Rohingya sehingga konflik internal pun tidak bisa dihindarkan lagi. Pada tahun 2012,

terjadi konflik internal antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Bermula dari pembunuhan terhadap wanita Rakhine bernama Ma Thida Htwe oleh tiga orang Rohingya dan insiden pembunuhan 10 muslim di dalam bus (<http://www.myanmar.com>, 2012). Konflik ini menelan hingga 192 orang tewas, 265 luka-luka, 8614 rumah rusak serta banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang rusak (Republic of the Union of Myanmar, 2013).

Konflik internal antara etnis Rakhine dan Rohingya ini telah menarik perhatian masyarakat internasional termasuk organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang ikut memperhatikan konflik Rakhine-Rohingya ini adalah Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Organisasi ini adalah organisasi berbasis Islam terbesar di dunia, mempunyai 57 negara anggota yang tersebar di empat benua. Tujuan organisasi ini salah satunya adalah melenyapkan diskriminasi dalam segala bentuk lalu mengambil langkah-langkah untuk mendukung perdamaian serta keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci serta memperteguh perjuangan semua kaum muslimin dengan maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan dan hak-hak nasional. (www.oic-oci.org)

Dari uraian di atas pertanyaan yang muncul adalah “Bagaimana peran OKI dalam konflik etnis Rakhine-Rohingya pada tahun 2012 ini dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh OKI dalam menangani konflik tersebut?” pertanyaan ini penting karena dapat diketahui peran apa saja yang sudah OKI lakukan dan hambatan yang dihadapi pada konflik Rakhine-Rohingya ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori organisasi internasional dengan paradigma liberalisme institusional. *Organisasi Internasional adalah* pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2005). Peran utama organisasi internasional dalam menangani sebuah konflik adalah sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator. (Perwita dan Yani, 2005)

Hal tersebut dipertegas dengan paradigma liberalisme yang memandang aktor berbeda dengan kaum realis, realis memandang negara sebagai aktor utama, sedangkan kaum liberal memandang bahwa *non-state actor* juga memiliki kontribusi dan peranan yang relevan dalam hubungan internasional. Namun, liberalisme juga tidak mengelak bahwa negara juga merupakan aktor yang dominan. Liberalisme sendiri terdiri dari beberapa macam aliran, antara lain liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, liberalisme institusional, dan liberalisme republikan. (Jackson dan Sorensen, 2013). Liberalisme institusional mengatakan dengan adanya institusi internasional atau organisasi internasional yang dibentuk oleh beberapa negara ini akan dapat menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan mencapai tujuan bersama, sehingga dengan kerjasama tersebut akan mengurangi terjadinya konflik dan perang. (Viotti dan Kauppi, 1990)

2. Pembahasan

OKI merupakan organisasi antar pemerintah terbesar setelah PBB yang berbasis Islam, memiliki anggota berjumlah 57 negara yang tersebar di empat benua. Organisasi ini didirikan sebagai akibat dari pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dibentuk dalam keputusan KTT yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada tanggal 12 Rajab 1389 Hijriah atau 25 September 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerja sama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan

membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. (<http://www.kemlu.go.id> diakses pada tanggal 11 Januari 2016 pukul 12.30 WIB)

Organisasi ini tidak hanya mementingkan negara-negara anggotanya saja namun negara yang bukan anggotanya mendapatkan perhatian dari OKI. Resolution OIC/CFM-39/2012/MM/RES/FINAL tentang Muslim Communities and Minorities in-Non OIC Member State berisi mengenai kaum muslim yang terdiskriminasi di negara-negara bukan anggota OKI termasuk Myanmar.

Isi pada resolusi no. 1/39-MM tentang Safeguarding The Rights of Muslim Communities and Minorities in Non OIC Member State sebagai berikut menyerukan kepada negara-negara anggota untuk memberikan bantuan kepada masyarakat muslim minoritas di negara-negara non anggota dan berkontribusi pada penyelesaian masalah mereka melalui kerjasama dengan pemerintah negara-negara tersebut; berkoordinasi antar negara-negara anggota untuk menemukan cara bagaimana membantu mereka dan memecahkan masalah mereka; untuk melindungi agama, budaya, hak-hak sipil, politik dan ekonomi mereka dan melestarikan identitas Islamnya lalu menekankan perlindungan hak-hak dan identitas masyarakat muslim minoritas di negara anggota non-OKI terutama bertanggung jawab kepada pemerintah negara-negara tersebut serta tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional; mendukung upaya yang diberikan oleh sekjen dalam menangani masyarakat muslim minoritas di negara-negara non anggota, dan mendesak dia untuk melanjutkan usaha-usaha dalam prinsip kerangka yang sesuai dengan hukum internasional dan perjanjian OKI sebelumnya; meminta sekjen untuk melanjutkan kontak dengan pemerintah negara-negara di mana masyarakat muslim minoritas itu ada; untuk memberitahukan kepada mereka tentang resolusi yang dikeluarkan oleh OKI dalam hal ini; mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan kebutuhan mereka yang belum terpenuhi; meminta sekjen bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk menarik perhatian PBB dan organisasi yang lain; mendesak negara-negara anggota dan lembaga muslim pada umumnya serta departemen OKI dan lembaga terkait pada khususnya; untuk berkoordinasi dengan sekjen OKI supaya mendapatkan dukungan lebih banyak dan bantuan untuk masyarakat muslim minoritas serta menegaskan pada negara-negara anggota untuk memberikan bantuan pendidikan, termasuk penyediaan instruktur untuk anak-anak dari masyarakat muslim, alokasi beasiswa bagi mereka. (Resolution Muslim Communities and Minorities in-Non OIC Member State, 2012). Adapun peran OKI dalam menangani konflik etnis Rakhine-Rohingya tahun 2012-2013 ini sebagai berikut:

a. OKI sebagai inisiator

Dalam penanganan konflik Rakhine-Rohingya ini, OKI berperan sebagai inisiator ketika OKI mendapatkan laporan bahwa di daerah Rakhine terjadi konflik hebat, organisasi ini segera mendesak negara-negara anggota OKI dan masyarakat internasional untuk segera meminta kepada pemerintah Myanmar untuk mencegah kekerasan tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan (<http://www.oic-oci.org>). Dengan desakan sekjen OKI tersebut negara-negara anggotanya seperti Indonesia, Malaysia, Arab dan lain-lain langsung bertindak menggunakan diplomasinya masing-masing untuk meminta pemerintah Myanmar segera menyelesaikan konflik tersebut. Seperti presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang mengirimkan surat kepada presiden Myanmar dan berencana untuk berkunjung ke sana. Lalu Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman juga mendesak Myanmar agar mengambil tindakan kuat untuk mencegah penganiayaan Muslim karna kekerasan komunal ini nantinya akan mengganggu hubungan negara-negara di Asia Tenggara. Arab Saudi juga akhirnya memberikan bantuan terhadap warga Rohingya sebanyak US \$50 juta. (<http://www.reuters.com>, 2013)

Selain meminta negara-negara anggota untuk membantu berdiplomasi dengan pemerintah Myanmar, Sekretaris Jenderal OKI periode 2005-2013 Ekmeleddin Ihsanoglu juga menyatakan tekad OKI untuk membawa masalah ini ke ranah forum internasional seperti PBB, National Commission for Human Rights, ASEAN, Uni Eropa untuk mendesak pemerintah Myanmar agar mengembalikan hak-hak Muslim Rohingya termasuk hak kewarganegaraan mereka. Dia juga menyatakan bahwa OKI siap bersedia untuk memberikan dukungan atau apapun yang diperlukan untuk memperbaiki situasi umat Islam di Myanmar. (<http://www.oic-oci.org>, 2012)

Sekjen OKI Ihsanoglu berulang-ulang menekankan kepada negara-negara anggotanya untuk dapat menggunakan kekuatan diplomasinya untuk mengembalikan hak kewarganegaraan etnis Rohingya. Ihsanoglu menjelaskan bahwa OKI terus mendukung dan berpartisipasi dalam semua upaya dan menginisiatif serta mengajak para aktor-aktor regional, nasional dan internasional untuk mencari solusi secara damai di konflik Myanmar tersebut agar hak-hak istimewa untuk Rohingya bisa segera dipulihkan. (<http://www.oic-oci.org>, 2012)

Langkah OKI selanjutnya adalah membentuk tim pencari fakta untuk melihat langsung keadaan di Arakan, tim ini dikenal dengan sebutan OIC Contact Group on Myanmar dibentuk pada saat pertemuan seluruh anggota OKI di Jeddah, Saudi Arabia pada 5 Agustus 2012, dan diresmikan saat KTT Luar Biasa OKI di Mekkah pada 14-15 Agustus 2012 yang juga menghasilkan Resolusi 3/4-EX (IS) untuk masalah etnis Rohingya di Myanmar. Tim ini terdiri dari pejabat level kementerian negara-negara anggota OKI, kemudian OKI juga melakukan koordinasi dengan perwakilan anggota ASEAN yang juga merupakan anggota OKI yaitu Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Kelompok ini bertugas untuk menemukan cara dan mekanisme untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Rohingya dan mengembalikan hak-hak kewarganegaraan mereka. (Weatherbee, 2013)

OKI berinisiatif untuk membawa dan membahas konflik Rohingya Rakhine ini ke PBB. OKI meminta agar PBB dan Dewan Keamanan turun tangan menangani kasus tersebut. Sekretaris Jenderal Ihsanoglu meminta ke PBB untuk mengirimkan utusan ke Myanmar untuk menyelidiki kasus tersebut. Akhirnya pada tanggal 24 Maret 2013 PBB mengirimkan delegasinya ke Myanmar Vijay Nambiar. Vijay mengunjungi ke lokasi konflik dan mendesak kepada pemerintah Myanmar agar kasus ini segera diselesaikan. (<http://www.muslimdaily.net>, 2013)

OKI telah lama ingin mendirikan OIC Office di tiga region yaitu Arab, Asia dan Afrika. Untuk wilayah Asia sendiri rencana akan didirikan di Myanmar. (wawancara dengan Ibu Siti Ruhaini Dzuhayatin melalui telepon pada tanggal 03 Februari 2016). Juru bicara OKI Tariq Bakheet mengumumkan pada tanggal 12 September 2012 di Markas Sekretariat Jenderal di Jeddah mengenai penandatanganan perjanjian antara OKI dengan pemerintah Myanmar untuk membuat sebuah kantor untuk penyediaan bantuan kemanusiaan lalu menghasilkan nota kerjasama antara OKI dan pemerintah Myanmar, nota tersebut dikenal dengan MoC (Memorandum of Cooperation) (<http://www.rohingya.org>, 2012). Namun hal ini dibatalkan, karena para biksu-biksu yang ada di Yangon dan Mandalay melakukan protes besar-besaran menolak OKI membangun kantor kemanusiaan di Myanmar lalu Presiden Thein Sein akhirnya membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

b. OKI sebagai fasilitator

Pada hari Jumat 10 Agustus 2012 OKI mengirimkan delegasinya ke Myanmar yang terdiri dari Jusuf Kalla ketua PMI, Asisten Sekjen OKI Atta El-Manan, Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed Gahnim Al Mahdeed dan Yayasan Amal Internasional di

Kuwait. Mereka bertemu kepada presiden Myanmar Thein Sein untuk membicarakan masalah bantuan OKI yang akan dikirimkan kepada korban konflik Rakhine Rohingya. Keesokan harinya, presiden Myanmar telah menyetujui untuk masuknya bantuan dari OKI terhadap korban konflik Rohingya dan Rakhine (<http://www.oic-oci.org>, 2012). Akhirnya telah disepakati mengenai bantuan untuk Rohingya dan Rakhine, pemerintah Myanmar mengatakan 8000 rumah yang harus dibangun namun OKI menyanggupinya hanya menyediakan 4000 rumah untuk kaum Rohingya dan Rakhine karena mereka pada saat di kamp penampungan sangat berdesak-desakan, fasilitas tidak memadai dan akses kesehatan yang buruk sehingga mereka direlokasi ke tempat yang lebih layak. Ihsanoglu berulang-ulang menekankan bahwa OKI tidak semata-mata membawa nama agama dan menyebarkan Islam di Myanmar, tetapi untuk membantu semua masyarakat yang terkena dampak kekerasan tanpa diskriminasi. (<http://www.voaindonesia.com>, 2012)

Pada pertemuan rutin OKI di Doha Qatar, Jumat tanggal 5 Oktober 2012 Jusuf Kalla meminta forum untuk memutuskan tiga hal dalam menyelesaikan konflik ini salah satunya adalah mengumpulkan dana. Akhirnya OKI setuju untuk mengumpulkan dana dan telah terkumpul sekitar US\$ 25 juta untuk korban konflik Rohingya dan Rakhine di Myanmar. Adapun rinciannya adalah \$15 juta dari lembaga-lembaga kemanusiaan dan \$10 juta dari negara-negara anggota OKI. Dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena dampak konflik (<http://www.thejakartapost.com>, 2012). Berdasarkan resolusi yang dibuat OKI mengenai diskriminasi Muslim yang terjadi di negara-negara non anggota yang sebelumnya sudah saya jelaskan di atas salah satunya adalah menegaskan pada negara-negara anggota untuk memberikan bantuan pendidikan, termasuk penyediaan instruktur untuk anak-anak dari masyarakat muslim, alokasi beasiswa bagi mereka. Pada konflik Rakhine-Rohingya ini sekjen OKI memobilisasi Islamic Development Bank untuk membantu perkembangan Rakhine di Myanmar dengan mendirikan fasilitas medis dan sebuah perguruan tinggi yang akan memenuhi kebutuhan kedua komunitas dengan memberikan bantuan mereka berupa pendidikan dan kesehatan. (Draft Resolution No. 4/40-MM on The Situation of The Muslim Community in Myanmar, 2013)

c. OKI sebagai mediator

Pada tanggal 25 Juli 2012 OKI setelah mendengar kabar konflik hebat di Rakhine, Myanmar sekjen OKI Ihsanoglu langsung mengirimkan surat kepada pemerintah Myanmar khususnya presiden Myanmar Thein Sein, di dalam surat tersebut berisi OKI mendesak kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik ini dan Ihsanoglu mengharapkan pemerintah Myanmar memberikan keamanan bagi korban Rohingya (<http://www.arabnews.com>, 2012), dibantu dengan Indonesia yang mengirimkan surat juga kepada presiden Thein Sein dan Myanmar membalas surat disebutkan bahwa tidak ada diskriminasi atau genosida terhadap Rohingya. Mereka menjelaskan kekerasan itu dipicu oleh pemerkosaan dan perampokan oleh tiga orang dari minoritas Rohingya di Kyauk Ni Maw, perkosaan itu memicu serangkaian bentrokan di Rakhine, dan penyelidikan masih berlangsung. (<http://www.republika.co.id>, 2012).

Lalu yang kedua pada tanggal 10 Agustus 2012 OKI mengirimkan delegasinya ke Rakhine Myanmar yaitu ketua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla, Asisten Sekjen OKI Atta El Mannan, Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed Gahnim Al Mahdeed. Mereka mengunjungi dan menemui langsung pengungsi korban konflik Rakhine Rohingya di Arakan. Mereka mengeluhkan bahwa di pengungsian kekurangan makanan dan obat-obatan. Keesokan harinya rombongan OKI menemui presiden Myanmar Thein Sein membicarakan dan meminta agar bantuan dari OKI bisa diterima oleh pengungsi Rakhine

Rohingya, dan pada akhirnya pemerintah Myanmar menerima bantuan kemanusiaan dari OKI untuk korban konflik. (<http://www.oic-oci.org>, 2012)

Yang ketiga, pada tanggal 15 November 2013 OKI berkunjung ke wilayah konflik di Myanmar. Sekretaris Jendral Ihsanoglu mengajak tujuh menteri luar negeri yaitu Indonesia, Bangladesh, Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Turki, dan Djibouti serta pejabat senior dari negara-negara anggota OKI akan bertemu dan berdialog dengan Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemimpin masyarakat Rakhine, pemimpin Rohingya serta badan-badan PBB. Mereka bertukar pendapat tentang konflik di Arakan, OKI memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaparkan kisah mereka masing-masing. (<http://www.oic-oci.org>, 2013)

Lalu delegasi OKI mengunjungi kamp-kamp pengungsi korban konflik yang berada di kota Sittwe dan Maungdaw, ia menjanjikan kepada korban-korban konflik bahwa OKI akan berupaya untuk membantu kedua komunitas agar mereka hidup bersama dengan damai dan harmonis. Saat OKI mengunjungi kamp tersebut, kaum muslim Rohingya bersorak-sorak menyambut sekjen OKI ini dan mereka melakukan doa bersama di Masjid Thabuchaung. Dalam kunjungan ke kamp tersebut Ihsanoglu didampingi juga dengan Chief Minister of Rakhine State, OKI berusaha membuka dialog lagi dengan umat Budha Rakhine yang menekankan bahwa OKI bukan merupakan organisasi agama dan tidak untuk menyebarkan Islam atau untuk semata-mata membantu Muslim, tetapi untuk membantu semua anggota masyarakat yang terkena dampak kekerasan tanpa diskriminasi. (<http://www.oic-oci.org>, 2013)

Yang keempat, adalah OKI telah mengirimkan perwakilannya untuk secara langsung meninjau dan memantau keadaan Rohingya disana, yang diutus dari OKI adalah Tan Sri Syed Hamid Albar mantan Menteri Luar Negeri Malaysia. Diharapkan dengan adanya perwakilan khusus dari OKI, Albar dapat meninjau langsung bagaimana keadaan para korban di Arakan serta dapat membuka pembicaraan antara para pemikir agama Islam dan para pemikir agama Budha serta organisasi masyarakat sipil yang dapat membantu OKI untuk menambah gerakan lebih banyak sehingga mudah untuk mencapai perdamaian antara seluruh komponen masyarakat di Myanmar. (<http://www.oic-oci.org>, 2012)

Hambatan-hambatan yang dihadapi OKI

Kegiatan atau peran OKI dalam menangani masalah kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar ini tidak semuanya berjalan dengan baik, OKI dihadapkan berbagai hambatan, terutama dalam menghadapi sistem pemerintahan Myanmar yang masih dalam masa transisi dari sistem otoriter. Hambatan yang pertama adalah OKI saat mengunjungi Myanmar disambut dengan demo besar-besaran di Myanmar dan pemerintah Myanmar seolah bersikap konservatif serta menolak jalinan konsolidasi atau perdamaian kedua belah pihak. Dengan sikap pemerintah tersebut, maka pergerakan OKI menjadi tidak leluasa dan sempit untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak (<http://www.radioaustralia.net.au>, 2012). Hambatan yang lain akibat kedatangan OKI disambut dengan protes tersebut adalah sulitnya akses masuk organisasi internasional lain dan NGO atas nama kemanusiaan pun ikut sulit masuk ke wilayah Myanmar. (wawancara dengan Bapak Heri Aryanto, SH,MH melalui email pada tanggal 20 Januari 2016)

Hambatan selanjutnya adalah penolakan terhadap pembangunan kantor kemanusiaan di Myanmar oleh OKI dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan rakyat Rakhine. Sehingga OKI tidak bisa memberikan bantuan kemanusiaan secara lancar dan seakan pemerintah Myanmar mengulur-ulur waktu jika dilihat dari penandatanganan perjanjian lalu menolak dengan sepihak secara tiba-tiba. (Weatherbee, 2013)

Hambatan yang terakhir adalah ketika OKI mengunjungi dan membantu konflik Myanmar dianggap menyebarkan ajaran Islam di Rakhine dan hanya berpihak pada

Rohingya saja meskipun sudah dikatakan berulang kali oleh sekjen OKI jika bantuan ini hanyalah bantuan atas nama kemanusiaan semata terbukti dengan OKI memberikan bantuan tidak hanya Rohingya saja namun Rakhine pun dapat merasakannya. Walaupun dihadapkan berbagai hambatan namun OKI telah berupaya berperan pada konflik Rakhine-Rohingya ini dengan baik. Jika diukur dari keberhasilannya, memang OKI belum sepenuhnya dapat tercapai. Namun OKI telah berusaha menjadi inisiator, fasilitator, dan mediator dengan baik.

3. Kesimpulan

Upaya-upaya yang dilakukan OKI sudah dilakukan dengan baik namun masih ada hambatan-hambatan yang menghalangi peranan tersebut. Setidaknya OKI sudah memberikan kontribusi terhadap konflik ini, namun kapasitas OKI hanya sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator memberikan rekomendasi terkait bagaimana penyelesaian konflik ini bukan sebagai Arbitrasi. Semua keputusan ada di negara Myanmar sendiri.

Daftar Pustaka

- Jackson, Robert dan Sorensen Georg (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional, Teori dan Pendekatan, Edisi Kelima*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2014.
- Le Roy A. Bennet. *International Organizations: Principles and Issues*. Prentice Hall Inc. New Jersey, 1997.
- May Rudy, Teuku. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Refika Aditama. Bandung, 2005.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2005.
- Weatherbee, Donald E. *Indonesia in ASEAN Vision and Reality*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore, 2013.
- OIC. Draft Resolution No. 4/40-MM on The Situation of The Muslim Community in Myanmar, 2013
- OIC. Resolution Muslim Communities and Minorities in-Non OIC Member State, 2012
- Fortify Rights. *Persecution of The Rohingya Muslims: Is Genocide Occuring in Myanmar's Rakhine State? A Legal Analysis* by Fortify Rights, 2015
- Republic of the Union of Myanmar. *Final Report of Inquiry Commision on Sectarian Violence in Rakhine State*, 8 Juli 2013.
- Ethnic Nationalities of Burma. Dalam <http://www.oxfordburmaalliance.org/ethnic-groups.html> diakses pada tanggal 29 November 2014.
- Final Communiqué of the OIC Contact Group on Myanmar Muslim Rohingya Minority. Dalam http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=7964&ref=3219&lan=en&x_key=rohingya diakses tanggal 5 Februari 2016
- Indonesian president urges Myanmar to address Muslim violence. Dalam <http://www.reuters.com/article/us-indonesia-myanmar-idUSBRE93M04Z20130423> diakses pada tanggal 20 Februari 2016
- Malaysia urges Myanmar to stem anti-Muslim violence. Dalam <http://www.reuters.com/article/us-malaysia-myanmar-idUSBRE95T07F20130630> diakses pada tanggal 8 Oktober 2015
- Myanmar Approves Access For OIC Assistance In Arakan. Dalam http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=7080&ref=2911&lan=en&x_key=thein%20sein diakses tanggal 8 Februari 2016
- Myanmar Replies Indonesian Letter Questioning Rohingya Issue. Dalam <http://www.replubika.co.id> diakses pada tanggal 29 Desember 2015

- OIC collects \$25 million for Rohingya and Rakhine. Dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/05/oic-collects-25-million-rohingya-and-rakhine.html#sthash.1yY5O1Yr.dpuf> diakses tanggal 20 Januari 2016
- OIC Secretary General visits camps in Rakhine State, Myanmar. Dalam http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=8607&ref=3463&lan=en&x_key=discrimination diakses tanggal 15 Januari 2016
- OIC signs Memorandum to open Office for Humanitarian Affairs with the Government of Myanmar. Dalam <http://www.rohingya.org/portal/index.php/rohingya-library/42-politics-a-strategy/376-oic-signs-memorandum-to-open-office-for-humanitarian-affairs-with-the-government-of-myanmar.html> diakses tanggal 5 Februari 2016
- Organisasi Kerjasama Islam. Dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx> diakses pada tanggal 7 Desember 2014.
- The OIC expresses grave concern over the situation of Myanmar Rohingya Muslims. Dalam http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=7023&ref=2894&lan=en&x_key=rohingya diakses tanggal 18 Januari 2016
- Utusan PBB: Kerusuhan di Myanmar Seperti Sudah Terencana. Dalam <http://www.muslimdaily.net/berita/internasional/utusan-pbb-kerusuhan.html> diakses tanggal 6 Februari 2016
- Wawancara VOA dengan Ketua PMI Jusuf Kalla mengenai Pengungsi Rohingya. Dalam <http://www.voaindonesia.com/content/wawancara-voa-dengan-ketua-pmi-jusuf-kalla-mengenai-pengungsi-rohingya/1484904.html> diakses tanggal 10 Februari 2016
- Wawancara dengan Bapak Heri Aryanto, SH. MH. Selaku Direktur Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) tahun 2012-2014 by email pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 14.30 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Siti Ruhaini Dzuhayatin selaku Ketua Komisi HAM dalam OKI atau *The Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Organization of Islamic Cooperation (OIC)* periode 2012-2014 melalui telepon pada tanggal 03 Februari 2016 pukul 16.00 WIB.